

Politik Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat

Arie Oktara

(Mahasiswa Pascasarjana Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada)

Email: oktara_arie@yahoo.com

Abstract

This article about the political power of religious leaders in the local political arena. This article analyzes the socio-cultural factors that create significant influence of tuan guru and specifically make electoral win the election. The results show two main things that ulama still have a significant role in the political landscape and agrees that the socio-cultural factors are still very influential on the role and voting behavior in local communities in Indonesia.

Keywords: *tuan guru, local politics, voting behavior*

Abstrak

Tulisan ini tentang kekuatan politik pemimpin agama dalam pentas politik lokal. Tulisan ini menganalisis faktor sosio-kultural yang membuat pengaruh tuan guru signifikan dan secara khusus membuatnya menang dalam pemilihan elektoral. Hasilnya menunjukkan dua hal utama bahwa ulama masih memiliki peran signifikan di lanskap politik serta mengamini bahwa faktor sosio-kultural masih sangat berpengaruh terhadap peran dan perilaku memilih di masyarakat lokal di Indonesia.

Kata kunci: *tuan guru, politik lokal, perilaku memilih*

PENDAHULUAN

Ulama adalah salah satu entitas yang memiliki pengaruh besar dalam aras sosial politik di Indonesia. Pengaruh itu menurut Fealy (2011) terutama dibangun oleh para ulama dengan menyandarkan diri pada institusi yang berbasis pada pendidikan (Islam) yang bernama pesantren yang menempatkan diri ulama; kyai di Jawa Timur dan Madura; buya di Sumatera Barat; atau tuan guru di Nusa Tenggara Barat, sebagai patron dengan modal pengetahuan agamanya. Terlebih pesantren-pesantren tersebut kebanyakan dibangun di kampung-kampung, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi yang intens antara ulama, pesantren, dengan masyarakat sekitar. Modal pengetahuan dan posisi ulama sebagai entitas tertinggi di insti-

tusi pesantren tersebut, menempatkan para ulama sebagai sosok dengan ketokohan yang sentral, terutama di masyarakat berbasis Islam tradisional (Aziz dalam Fealy, 2011).

Pengaruh ulama tersebut, tetap terjaga hingga pada masa Orde Baru. Pasalnya, pemerintah Orde Baru kala itu menekan sedemikian rupa pengaruh ulama di ranah politik praktis, dengan hanya menempatkan mereka sebagai aktor yang memobilisasi massa ketika musim pemilihan umum tiba. Pembatasan peranan para ulama di politik, justru menjadikan peranan mereka di ranah kultural sebagai entitas yang mendominasi ilmu pengetahuan tetap terjaga. Sebab dengan dibarikadennya para ulama dari politik oleh negara (Orba), ulama justru dapat tetap menjaga perannya sebagai sentrum di "habitat" yang merupakan ruang utama yang

menciptakan legitimasi bagi kuasa sosio-kulturalnya: pesantren. Dengan terjaganya pengaruh di pesantren, secara lebih lanjut pengaruh mereka di masyarakat pun dengan demikian tetap terjaga.

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 yang diikuti dengan proses demokratisasi yang di antaranya dilakukan dengan menciptakan keterlibatan masyarakat lebih luas di ranah politik, memberi kesempatan politik bagi para ulama untuk merebut jabatan-jabatan politik baik di eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks politik nasional misalnya, KH. Abdurrahman Wahid, putra dari menteri agama pada kabinet pertama Indonesia, KH. Wahid Hasyim, dan cucu dari pendiri Nadhlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asyari, berhasil menjadi presiden ke empat Republik Indonesia pada 1999 menggantikan BJ. Habibie. Di konteks politik lokal, pengaruh mereka yang signifikan di masyarakat membuat beberapa dari mereka mampu mengamankan posisi sebagai kepala daerah, terutama di daerah-daerah lumbung masyarakat Islam tradisional. Sebut saja KH Robbach Ma'sum (Bupati Gresik 2000-2005), KH. Kholilurrahman (Bupati Pamekasan 2008-2013), atau KH. Abuya Busyro Karim (Bupati Sumenep 2010-2015).

Di Nusa Tenggara Barat, Muhammad Zainul Majdi atau lebih dikenal dengan Tuan Guru Bajang (TGB), berhasil menjadi gubernur pada 2008. Dengan hanya disokong oleh dua partai kecil, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) TGB, cucu Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid atau lebih dikenal dengan sebutan Tuan Guru Pancor (TGP)-pendiri Nadhlatul Wathan, Organisasi Islam terbesar di NTB. Ia berhasil mengalahkan gubernur *incumbent* yakni, Lalu Serinata. Padahal, Serinata diusung oleh Partai Golongan Karya (Golkar), yang pada masa itu adalah partai berkuasa di Nusa Tenggara Barat. Pada Pemilu legislatif NTB tahun 2004, partai beringin tersebut berhasil

menang dengan mengantongi 24,86%. Kemenangan TGB pada 2008 membuatnya mencatatkan "rekor" sebagai gubernur termuda dan gubernur pertama yang berlatar organisasi massa.

Hal-hal yang penulis paparkan di atas, menegaskan betapa signifikannya pengaruh ulama dalam ranah sosial politik di Indonesia pasca Orba. Namun menariknya penelitian-penelitian terbaru memperlihatkan bahwa pengaruh para ulama, terutama jika dilihat dari kemampuan mereka untuk merebut posisi sebagai kepala daerah di kantong-kantong masyarakat tradisional, mengalami penurunan. Penelitian terbaru oleh Abdullah Achmad Madani (2015) tentang pengaruh politik kyai di Pamekasan, Madura, misalnya, menunjukkan kecenderungan menurunnya pengaruh kyai tersebut. Menurut Madani, keterlibatan kyai dalam politik praktis yang justru menyebabkan pengaruh mereka di masyarakat tidak sekuat sebelumnya. Hal ini disebabkan karena para kyai yang menerjunkan diri ke dalam dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan politik, justru meninggalkan pesantren. Implikasinya, hubungan personal mereka dengan para santri dan masyarakat sekitar, malahan pelan-pelan tercerabut. Secara perlahan, pengaruh mereka pun kendur. Selain itu, Madani menyebut munculnya intelektual-intelektual muda berlatar pesantren membuat kyai tak lagi mendominasi ilmu pengetahuan sehingga membuat pengaruh kyai luntur.

Jika paling tidak di Pamekasan, Madura, pengaruh kyai (baca: ulama) seperti yang ditunjukkan oleh Madani (2015) mengalami penurunan, tidak demikian dengan tuan guru di Nusa Tenggara Barat (NTB). Semenjak Tuan Guru Bajang (TGB) menduduki kursi Gubernur NTB pada 2008, pengaruh para tuan guru, justru terlihat meningkat. Keberhasilan TGB menjadi orang nomor satu di NTB secara tak langsung membuat pengaruh mereka di NTB semakin meningkat, terutama di Lombok yang

menjadi kantung Pada pemilihan gubernur di 2013. TGB berhasil kembali memenangkan pertarungan dengan memperoleh suara yang cukup signifikan, yakni 44,37%.

Oleh sebab itu, menarik untuk melihat faktor sosio-kultural yang membuat pengaruh tuan guru di NTB signifikan dan secara khusus membuat TGB menang pemilihan gubernur pada 2008, dan secara umum membuat peranan para tuan guru kuat di NTB hingga saat ini. Penulis berhipotesa bahwa tuan guru memiliki pengaruh yang kuat di NTB hingga saat ini terkait dengan tiga hal utama yang berkaitan dengan faktor sosio-kultural: mengakarnya Nadhlathul Wathan, pengaruh Tuan Guru Pancor sebagai ulama utama di NTB, serta kemenangan Muhammad Zainul Majdi pada 2008 itu sendiri. Untuk itu, tulisan ini akan difokuskan untuk membidik tiga hal tersebut. Tulisan ini akan menggunakan pendekatan Mazhab Kolumbia yang diperkenalkan oleh Lazarsfeld untuk menganalisa faktor sosiologis yang memengaruhi perilaku memilih, dan akan menggunakan data sekunder berupa data KPU, kliping berita online, buku, tesis, serta tulisan lain terkait dengan pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dilakukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni: studi literatur yang dilakukan melalui membaca buku-buku yang berkaitan dengan studi dan mengumpulkan data-data sekunder dari dokumen terkait, serta metode wawancara dengan beberapa orang informan. Adapun informan penelitian ini yaitu: tokoh agama, akademisi, anggota DPRD NTB, serta beberapa orang masyarakat NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum memaparkan secara singkat sejarah Nadhlathul Wathan dan pengaruh Tuan Guru Pancor bagi masyarakat NTB beserta berimplikasi pada kemenangan Tuan Guru Bajang, terlebih dahulu dijelaskan mengenai Mazhab Kolumbia atau juga dikenal dengan nama model sosiologis. Model ini merupakan model yang muncul paling awal dalam lingkup kajian perilaku memilih. Disebut juga sebagai Mazhab Kolumbia karena lahir pada 1950an dan bermula dari riset yang dilakukan oleh Paul Lazarsfeld di Universitas Kolumbia pada 1940. Ia menyurvei 600 calon pemilih di Erie County, Ohio, sebanyak 7 kali guna mengukur perubahan suara individu selama masa kampanye presiden pada 1940. Studi yang kemudian dibukukan dalam dua volume tersebut menemukan bahwa pada masa itu, keputusan pemilih lebih disebabkan oleh loyalitas yang berdasarkan sosiologis, terutama agama dan kelas sosial (Bartels, 2008)

Dari temuannya tersebut, Lazarsfeld, dan ilmuwan lain dari Mazhab Kolumbia, kemudian mencatat bahwa faktor sosiologis itulah yang kemudian lebih menentukan preferensi pemilih seseorang. Lebih lanjut, mazhab ini melihat bahwa masyarakat merupakan bangunan kelompok bertingkat, dan karenanya hierarkis. Implikasinya, perilaku masyarakat kemudian dibentuk oleh aturan-aturan sosial yang dilandaskan pada pengelompokan serta karakteristik sosiologis, yakni (terutama) status sosial, agama, pendidikan, serta kelompok etnik/ kedaerahan/ bahasa. Oleh karena itu, pilihan politik kepartaian atau kandidat, adalah hasil atau paling tidak berkaitan erat dengan karakteristik dan pengelompokan individu secara sosiologis tersebut (Bartels, 2008). Menurut Lazarsfeld dan koleganya, perilaku memilih lebih didasarkan pada nilai-nilai kultural yang diturunkan secara turun temurun (lewat keluarga dan sebagainya) yang kemudian membentuk preferensi tertentu mengenai kandidat mana atau partai apa yang akan

mereka pilih. Lebih lanjut, keputusan untuk memilih menurut Lazarsfeld, tidak ditentukan oleh pilihan rasional. Meski dianggap kurang signifikan untuk menjelaskan perilaku memilih, studi yang dilakukan oleh Lazarsfeld tersebut dianggap sebagai referensi klasik utama yang mengawali studi-studi selanjutnya yang lebih lengkap dan relevan membahas perilaku memilih dengan mempertimbangkan aspek-aspek lain yang berpengaruh terhadap perilaku dan preferensi elektoral.

Hasil temuan Lazarsfeld tersebut dengan cepat mendapatkan tentangan dari hasil temuan studi lain, yang memasukkan faktor-faktor lain, misalnya psikologis yang kemudian menelurkan Mazhab Michigan. Mazhab Kolumbia serta studi lain setelahnya oleh Mazhab Michigan dianggap mengecilkan peranan yang diberikan oleh partai dan media massa dalam membentuk perilaku memilih, karena penelitian yang mereka lakukan lebih berfokus pada pengaruh interpersonal dengan mengukur persepsi mengenai pandangan politik dalam lingkup keluarga serta perkawanan. Singkatnya, model ini berasumsi bahwa perilaku memilih ditentukan oleh karakteristik sosiologis para pemilih, terutama kelas sosial, agama, dan kelompok etnik/kedaerahan/bahasa (Mujani et al, 2012: 6).

Namun, secara kontekstual, pendekatan Mazhab Kolumbia tentu saja masih signifikan guna membingkai serta menganalisis kasus-kasus tertentu. Misalnya nilai-nilai yang memengaruhi preferensi politik di masyarakat dengan tipologi tradisional, yang karenanya masih menimbang kultur, pendidikan, serta agama beserta status-status sosial yang berlandaskan atasnya, masih berpengaruh kuat terhadap masyarakat di daerah seperti Nusa Tenggara Barat. Mazhab Kolumbia ini, paling tidak pernah dipinjam oleh Affan Gaffar dalam *"Javanese Voters"* guna menganalisis perilaku politik pemilih di beberapa daerah di Jawa yang meski di bawah bayang-bayang rezim Orde Baru yang hegemonik, tetap kon-

sisten memilih partai di luar partai pemerintah dari waktu ke waktu.

"Tuan Guru" merupakan gelar kehormatan yang disematkan pada ulama-ulama di Nusa Tenggara Barat yang memiliki pengaruh terutama atas pengetahuan agama yang mereka miliki. Umam (2009) secara lebih spesifik menyebutkan bahwa peranan Tuan Guru di Lombok, berkaitan dengan dua tesis yang diajukan oleh Clifford Geertz dan Hiroko Horikoshi. Geertz, dari penelitiannya di Mojokuto pada era 1950an, menyimpulkan bahwa para kyai di Jawa, menjalankan suatu pola keagenan yang dalam bahasanya ia sebut sebagai *"cultural broker,"* (makelar budaya). Peran kyai sebagai makelar budaya ini, memungkinkan ia menjadi penyaring informasi dan budaya yang masuk ke dalam lingkungan kaum santri. Dalam artian, kyai kemudian memiliki kewenangan untuk memilih informasi serta budaya seperti apa yang "baik" untuk dimamah oleh para santri, serta menyingkirkan segala pengaruh buruk. Perannya sebagai pemfilter ini, sekaligus memungkinkannya untuk menjauhkan nilai-nilai yang dapat menggugat kuasanya sebagai entitas yang terlegitimasi untuk memimpin. Sementara Hirokoshi, berdasarkan penelitiannya atas ulama-ulama di masyarakat Sunda, sedikit menyangkal, namun sekaligus melengkapi tesis Geertz, ia berargumen bahwa ulama-ulama bukan hanya sekedar penyaring informasi yang kemudian digunakan untuk meredam implikasi dari masuknya informasi tersebut bagi masyarakat. Namun, lebih lanjut Hirokoshi berargumen bahwa para kyai adalah pihak yang justru berperan aktif menggunakan informasi yang ia peroleh untuk memunculkan perubahan-perubahan sosial dengan cara menawarkan agenda-agenda yang ia anggap cocok untuk diterapkan pada masyarakatnya.

Dari kedua tesis tersebut, Umam kemudian mengaitkannya dengan keberadaan serta peranan Tuan Guru di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok.

Menurutnya, meski tesis Geertz dapat dengan mudah dibantah terutama dengan adanya perkembangan arus informasi dan teknologinya yang begitu massif, sehingga peranan Kyai sebagai makelar budaya dimentahkan karena ia tidak lagi menjadi sumber informasi. Namun menurut Umam, kedua tesis tersebut masih cukup relevan untuk diterapkan pada Tuan Guru di Lombok.

Secara tipikal, muslim Sasak di Lombok masih secara relatif berkultur tradisional, berkesadaran paternalistik, serta bermental agraris (Umam, 2009) Karenanya, Tuan Guru kemudian menjadi entitas yang menentukan pembentukan wacana, terutama wacana keagamaan di masyarakat muslim Nusa Tenggara Barat. Menjadi tempat bergantung masyarakat muslim Sasak, terutama terkait wacana agama, sosial, bahkan politik. Tulisan Umam tersebut menjadi penjelas posisi Tuan Guru yang begitu kuat terutama sebagai pembentuk wacana di masyarakat muslim NTB. Ketokohan Tuan Guru, bahkan melekat pada gelar “Tuan Guru” itu sendiri yang diturunkan kepada garis keturunannya.

Secara historis, pengaruh tuan guru di Nusa Tenggara Barat tak bisa dilepaskan dari Nadhlatul Wathan dan Tuan Guru Pancor. Nadhlatul Wathan, yang jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “Kebangkitan Negeri,” didirikan pada 1916 oleh KH Abdul Wahab Chasbullah, seorang kyai muda sekaligus aktivis bersama KH Mas Mansoer yang pada kemudian hari lebih dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah. Pada mulanya, NW adalah nama madrasah (institusi pendidikan) dasar modern yang didirikan oleh mereka berdua di Surabaya. Pengajar pada madrasah ini kebanyakan terdiri dari kyai-kyai muda dari kalangan Islam tradisional, diantaranya Bisri Syansuri, Abdul Hakim Leimunding dan Abdullah Ubaid. Ketiganya kemudian lebih dikenal sebagai tokoh yang memiliki peran penting di Nadhlatul Ulama (Fealy, 2011: 29-30)

Cabang-cabang NW di luar Surabaya segera dibuka di banyak kota-kota lain di Jawa. Dua tahun setelah NW didirikan, Wahab Chasbullah bersama K. H. Achmad Dahlan, seorang kyai senior asal Surabaya mendirikan kelompok diskusi Taswirul Afkar, yang kemudian menyelenggarakan forum-forum debat antara para Islam tradisional dengan Islam modernis. Wahab, pada tahun yang sama, bersama Hasyim Asy’ari, kemudian juga mendirikan koperasi dagang dengan nama Nahdlatut Tujjar (Kebangkitan Pedagang.) Menurut Fealy (2011), di antara ketiga organisasi yang didirikan oleh Wahab Chasbullah tersebut, hanya NW yang berumur lebih panjang dari yang lain. Fealy tidak menyebut secara spesifik mengapa organisasi selain NW tidak bertahan lama, dan berapa tahun mereka bertahan.

Kemudian pada fase selanjutnya, NW yang pernah mencoba memadukan Islam tradisional dan modern itu mulai tenggelam pengaruhnya dibandingkan dengan ormas-ormas Islam lain. Padahal, Wahab Chasbullah yang mendirikan NW sempat menjadi Rais Am NU, organisasi keagamaan sekaligus sosial yang didirikan oleh (sekaligus untuk menghimpun) para kyai-kyai terkemuka Islam tradisional. Tokoh-tokoh lain NW juga menyusul menjadi tokoh-tokoh yang diperhitungkan perannya di NU. Padahal, sayap pemuda NW yakni Syubhanul Wathan (Pemuda Negeri,) yang muncul sejak pertengahan 1920an, sempat menjadi organisasi pemuda Islam tradisional yang terbesar (Anam, 1990). Bahkan, organisasi ini dalam perkembangan selanjutnya bersama organisasi pemuda Islam tradisional yang lain, menjadi salah satu embrio yang melahirkan Anshor, organisasi pemuda tradisional Islam yang masih eksis hingga saat ini. Agaknya, NU yang muncul belakangan sebagai organisasi yang menghimpun organisasi-organisasi Islam tradisional yang semula bersebaran, sekaligus menjadi tempat “baru” bagi Wahab Chasbullah untuk bergiat, menjadi organisasi induk

anyar yang menenggelamkan pengaruh serta pamor organisasi-organisasi yang lebih dulu bermunculan namun memiliki skala lebih kecil seperti NW.

Pada 1953, Tuan Guru Kyai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid (Tuan Guru Pancor) mendirikan organisasi Nahdlatul Wathan di NTB. sebagai jama'iyah diniyah islamiyah (organisasi keagamaan Islam) di NTB. Kegiatan "NW Baru" ini dipusatkan pada bidang pendidikan, sosial, serta dakwah Islam. Embrio NW sendiri, paling tidak sudah muncul semenjak 1934 saat Tuan Guru Pancor mendirikan pesantren Al-Mujahidin. Pada 1937, Tuan Guru Pancor kemudian mendirikan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) serta Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) pada 1943.

Dalam sejarah NW, pendirian NW dilatarbelakangi oleh "kebutuhan akan adanya suatu badan yang dapat berfungsi sebagai koordinator, pembimbing dan pengayom dari kegiatan Madrasah Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI) dan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah (NBDI) yang telah berkembang pesat dengan banyaknya cabang-cabang kedua madrasah yang tersebar diberbagai wilayah dan desa di Pulau Lombok." Kedua lembaga pendidikan yang kemudian disatukan menjadi Pondok Pesantren Darun Nahdlatul NW (PPDNW) Pancor itu merupakan modal awal NW, sekaligus Tuan Guru Pancor memperoleh legitimasinya sebagai tempat dan pihak yang berkompeten atas keilmuan (agama).

Selain memiliki legitimasi di keilmuan Islam, Tuan Guru Pancor juga memiliki peranan terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lombok. Dengan menggunakan pesantren sebagai tempat membangun kesadaran sekaligus sebagai pusat perjuangan kemerdekaan, Tuan Guru Pancor beserta keluarga intinya ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan. Hal ini, membuat ketokohan Tuan Guru Pancor dan NW sebagai organisasi yang ia pimpin, memi-

liki legitimasi yang demikian kuat. Pengaruhnya begitu mengakar di ranah sosial dan politik di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Lombok.

Pasca kemerdekaan RI misalnya, beberapa partai Islam seperti Partai NU dan PSII mesti mendapatkan "restu" dari Tuan Guru Pancor agar dapat berdiri di Nusa Tenggara Barat. Tuan Guru Pancor sendiri, sejak 1952 aktif sebagai Ketua Badan Penasehat Masyumi Daerah Lombok dan membesarkan Masyumi di daerah tersebut. Pengaruh tuan guru pancor sebagai tokoh yang memiliki legitimasi intelektual terutama agama, serta legitimasi ekonomi dengan pemilikan tanah, tak tertandingi oleh kekuatan sosio-kultural lain. Bahkan kekuatan tradisional lain yakni bangsawan (lazim disebut *Lalu*) tidak mampu menandingi kekuatan NW (Tuan Guru Pancor) karena legitimasi kekuasaannya di masyarakat tergerus sedemikian rupa, terutama pada masa kolonial Belanda.

Ruang utama yang memproduksi kekuasaan sosio-kultural ulama adalah lembaga pendidikan, yakni pesantren. Pengaruh Tuan Guru Pancor di NTB juga disebabkan oleh kemampuannya untuk mengembangkan lembaga pendidikan miliknya. Sejak 1943 hingga 1997, ia berhasil menciptakan 800 buah lembaga pendidikan (Hamdi, 2012). Menariknya lagi, lembaga pendidikan yang berada di bawah otoritasnya merentang dari tingkat taman kanak-kanak sampai menengah atas serta 4 perguruan tinggi. Seiring dengan berkembang pesatnya lembaga-lembaga pendidikan milik NW, pengaruh tuan guru juga semakin besar dan mengakar di kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga pendidikan milik NW yang tersebar di Nusa Tenggara Barat tersebut melahirkan ribuan ulama yang kemudian membikin pesantren-pesantrennya sendiri. Besarnya kuantitas lembaga pendidikan milik NW atau paling tidak berafiliasi ke NW tersebut berdampak pada dua hal. Pertama adalah

pengaruh tuan guru secara umum yang semakin besar sebagai entitas puncak dari institusi-institusi pesantren tersebut. Kedua, tentu saja adalah pengaruh Tuan Guru Pancor yang mampu mempertahankan diri sebagai sentrum yang bertindak sebagai patron bagi kliennya, guru bagi murid-muridnya. Kemampuan TGP untuk menjaga otoritasnya sebagai “ulama tertinggi” di NTB selama ia hidup tersebut, tentu juga berpengaruh secara signifikan terhadap PPDNW Pancor sebagai institusi pendidikan utama di NTB. Secara tidak langsung, secara politik keberadaan NW, Tuan Guru Pancor, serta PPDNW Pancor sebagai sentrum politik ulama di NTB tersebut jelas juga berpengaruh terhadap TGP dan keluarganya sebagai salah satu aktor utama di sosial-politik NTB.

Pada Oktober 1997 di usianya yang ke 99, Tuan Guru Pancor menghembuskan napasnya yang terakhir. Meninggalnya Tuan Guru Pancor, menyebabkan perpecahan yang disebabkan oleh konflik internal di keluarga terkait dengan pewarisan pondok pesantren, kepemimpinan perempuan, serta siapa yang lebih berwenang atas gelar Tuan Guru Bajang. Gelar ini adalah gelar yang didapat oleh Tuan Guru Pancor pada saat awal mula ia berdakwah agama di pulau Lombok, sebaliknya ia dari menuntut ilmu dan ibadah haji di Mekah pada kurun awal 1930an. Gelar yang menjadi penting sebagai legitimasi simbolik dari ketokohan Tuan Guru Pancor sebagai tokoh ulama utama di Nusa Tenggara Barat.

Tuan Guru Pancor, memiliki dua anak perempuan dari istri yang berbeda. Siti Rahun dari perkawinannya dengan Hajjah Zohariyah, dan Siti Raihanun dari perkawinannya dengan Hajjah Siti Rahmah. Paska kematian Tuan Guru Pancor, kedua anaknya ini kemudian berseteru memerebutkan pengelolaan Pondok Pesantren Darunnahdatain Nahdlatul Wathan (PPDNW), Yayasan Pendidikan Hamzanwadi, dan tentu saja, ratusan ribu pengikut fanatik yang tersebar di seluruh NTB

(Muhtar, 2010). Namun yang menjadi permasalahan, keduanya adalah perempuan yang dalam tradisi Islam tidak dibenarkan menjadi imam (pemimpin). Terlebih keduanya tidak memiliki popularitas di kalangan jamaahnya, apalagi jika dibandingkan dengan kepopuleran Tuan Guru Pancor. Pula, Raihanun disebut-sebut tidak memiliki kapabilitas intelektualitas yang cukup untuk menggantikan Tuan Guru Pancor. Walhasil, pewarisan baik lembaga pendidikan serta kepemimpinan umat menjadi konflik yang memecah belah Nahdlatul Wathan ke dalam dua kubu. Kubu Raihanun yang berpusat di Pancor, dan Raihanun yang berpusat di Anjani.

Pertikaian antara kedua kubu, mulai meruncing paska Mukhtar X PBNW. Dalam muktamar tersebut, Raihanun terpilih menjadi ketua. Hal tersebut membuat Rahun, yang demi menjaga tradisi Ahlusunnah wal Jamaah merelakan diri untuk tidak mencalonkan diri karena merasa tidak pantas menjadi pemimpin sebagai seorang perempuan, menuduh muktamar tersebut sebagai “penuh rekayasa dan tidak jujur,” serta menyalahi anggaran dasar NW yang tidak menghendaki perempuan sebagai imam jamaah. Mukhtar inilah yang membuat Raihanun memutuskan untuk keluar dari Pancor dan membuat pusat pendidikan baru di Anjani. Paska muktamar ini, NW “resmi” terpecah ke dalam dua kubu dengan ribuan massanya masing-masing.

Menariknya, jumlah lembaga pendidikan paska adanya konflik kepemimpinan, malah justru bertambah. Pasalnya, di daerah baru di mana salah satu kubu mendirikan lembaga pendidikan baru, kubu yang lainnya juga mendirikan lembaga pendidikan guna menandingi keberadaannya. Dalam kurun waktu 12 tahun dihitung dari awal konflik keduanya, lembaga pendidikan Nahdlatul Wathan telah berkembang hingga mencapai 900 buah yang tersebar di bermacam daerah di Nusa Tenggara Barat, meningkat hampir

setengah dari lembaga pendidikan yang diciptakan oleh Tuan Guru Pancor (Muhtar, 2010).

Jika dilihat dari sisi organisasional, perpecahan kedua kubu NW ini tentu berdampak tidak baik. Namun jika dilihat dari sisi pengaruh, perkembangan jumlah madrasah NW secara signifikan ini justru berimplikasi positif terhadap semakin menguatnya posisi NW dengan lembaga pendidikannya sebagai institusi yang utama dalam penyebaran pengetahuan (terutama agama), dan semakin kokohnya peran Tuan Guru selaku patron dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut. Hal tersebut tentu menjadi modal signifikan bagi keturunan Tuan Guru Pancor ketika diakumulasikan untuk memenangkan sebuah pertarungan politik.

Dua kubu ini pada perkembangan selanjutnya kemudian membentuk PBNW yang masing-masing memiliki pusat, AD/ ART, serta program yang berbeda-beda. Meski berbeda, untuk kepentingan memperoleh legitimasi dari jamaah NW, keduanya mengaku sebagai NW penerus Tuan Guru Pancor. Kedua NW, pada 2009 sama-sama melaksanakan muktamar yang kemudian memutuskan Siti Raihanun Zainudin Abdul Majid sebagai Ketua NW Anjani dan TG. H Muhammad Zainul Majdi sebagai ketua NW Pancor. Kedua kubu, juga sama-sama mengajukan keturunannya sebagai Tuan Guru Bajang. Kubu Pancor mengajukan TG. H Muhammad Zainul Majdi, dan Kubu Anjani mengajukan KH. Lalu Gede Zainudin Atsani sebagai Tuan Guru Bajang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, gelar ini menjadi penting terkait pihak mana yang absah sebagai penerus Tuan Guru Kyai Haji Zainudin Abdul Majid atau Tuan Guru Pancor selaku pendiri Nahdlatul Wathan di Nusa Tenggara Barat. Pecahnya Nahdlatul Wathan ini, juga berimplikasi pada afiliasi partai. Kubu Raihun, berafiliasi pada Partai Bulan Bintang (PBB), partai tempat Tuan Guru Pancor aktif selama ia hidup. Sedangkan Kubu Raihanun

kemudian mengafiliasikan diri pada Partai Bintang Reformasi (PBR).

Pada 2008, ketika perhelatan Pemilihan Umum Gubernur Nusa Tenggara Barat diadakan, Tuan Guru Haji Zainul Majdi, maju sebagai calon gubernur dari kubu Raihun dengan menggandeng PKS sebagai koalisi dengan PBB. Sedangkan Raihanun, meski tidak mencalonkan anaknya, karena umur yang tidak mencukupi, mendukung pencalonan H. Lalu Serinata, *incumbent* yang didukung oleh partai berkuasa, Golkar. Dalam pertempuran ini, TG. H. Zainul Majdi dari kubu Pancor, memenangkan pertarungan.

Kemenangan TG. H. Zainul Majdi tersebut, saya lihat disebabkan oleh legitimasi kubu Pancor yang lebih besar dibandingkan dengan legitimasi NW kubu Anjani. Hal tersebut, dikarenakan oleh Pondok Pesantren NW yang berada di Pancor, merupakan Pondok Pesantren tempat di mana Tuan Guru Pancor berpusat pada masa kepemimpinannya. Karenanya, meski berhasil mendapat dukungan dari para Tuan Guru, dan menciptakan pusat NW yang baru di Anjani, namun legitimasinya menjadi tidak cukup kuat karena pelekatan otoritas kuasa Tuan Guru Pancor, identik dengan Pondok Pesantren Pancor yang dikuasai oleh Siti Raihanun. Karenanya, gelar “Tuan Guru Bajang” yang dilekatkan kepada anaknya, TG. H. Zainul Majdi yang kemudian bertarung di pilgub NTB, menjadi lebih *legitimate* ketimbang gelar yang diberikan kepada anak Siti Raihanun.

Kemenangan TG. H. Zainul Majdi mungkin akan lebih susah jika saja ia berhadapan langsung dengan “Tuan Guru Bajang” dari kubu Raihanun, yakni KH. Lalu Gede Zainudin Atsani. Perkawinan gelar keagamaan (KH, Tuan Guru Bajang) dengan Lalu yang melekat pada anak dari Siti Raihanun tersebut, tentu merupakan modal politik simbolik yang kuat. Menimbang tipologi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang masih cenderung patriarki, di mana gelar yang bersifat turun temurun, baik berdasar kebangsawanan, atau

keagamaan masih memiliki signifikansi untuk menentukan perilaku pemilih masyarakat NTB. Permasalahannya, KH. Lalu Gede Zainudin Atsani tidak memenuhi persyaratan dari sisi umur.

Kemenangan TG. H. Zainul Majdi pada 2008 tersebut juga penulis lihat disebabkan oleh keputusan Siti Raihanun untuk menjadi ketua pada Mukhtar X PBNW. Hal tersebut malahan menjadi hal yang menyebabkan dukungan pada pemilihan Gubernur NTB, lebih banyak ditujukan kepada TG. H. Zainul Majdi. Pasalnya, dalam masyarakat Islam tradisional yang masih menyandarkan diri pada nilai-nilai agama, keputusan untuk menjadikan perempuan sebagai pemimpin, tentu berdampak pada tergerusnya dukungan, terutama dari kalangan jamaah NW tua yang masih kukuh pada nilai, organisasi (NW) maupun agama (Islam). Karenanya, dukungan kepada TG. H. Zainul Majdi dari kubu Pancor kemungkinan besar juga datang dari NW kubu Anjani, yang meski berlainan kubu, tetap menginginkan penerus langsung dari Tuan Guru Pancor sebagai sosok pemimpin NTB.

Kemenangan Muhammad Zainul Majdi pada 2008 adalah puncak dari pengaruh ulama di Nusa Tenggara Barat. Sejak saat itu, sosok ulama tak diragukan lagi sebagai aktor penting tak hanya di ranah sosial, namun juga di politik. Paling tidak jika dilihat dari keberhasilan TGB menjadi gubernur tersebut. Bahkan, pada pemilihan gubernur yang diikuti oleh TGB untuk kedua kalinya pada 2013, dia juga berhasil menang. Dalam konteks politik yang lebih anyar, sokongan TGB kepada pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa pada pemilihan presiden 2014 jauh sebelum partainya-Partai Demokrat-akhirnya secara resmi memutuskan mendukung Prabowo-Hatta, mampu membuat pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 tersebut mengamankan 72,45% suara di Nusa Tenggara Barat. Artinya, jika seperti yang ditunjukkan oleh Madani (2015) bahwa

pengaruh ulama-kyai di Pamekasan, Madura mengalami penurunan, paling tidak dari konteks Tuan Guru Bajang di Nusa Tenggara Barat, penurunan tersebut agaknya kasuistik.

KESIMPULAN

Tulisan ini berusaha untuk menunjukkan dua hal utama; bahwa ulama masih memiliki peran signifikan di lanskap politik NTB; serta mengamini bahwa faktor sosio-kultural yang berpengaruh terhadap peran, pengaruh para ulama yang lazim disebut tuan guru di NTB tersebut. Dua hal ini, menentang sekaligus mengamini penelitian Madani (2015) yang dari penelitiannya di Pamekasan berargumen bahwa; pengaruh ulama dalam politik menurun; dan bahwa menurunnya pengaruh mereka di politik, justru disebabkan oleh keterlibatan mereka dalam politik itu sendiri. Hal tersebut penulis lihat tak terjadi dalam konteks NTB. Keterlibatan Tuan Guru Bajang dalam pemilihan gubernur pada 2008 yang kemudian dimenangkannya, justru menjadi titik di mana peranan tuan guru di NTB meningkat drastis. Seperti telah penulis tunjukkan, kemenangan tersebut justru mengonsolidasikan pengaruh tuan guru di NTB yang secara historis terutama disebabkan oleh dua faktor: mengakarnya NW, serta ketokohan Tuan Guru Pancor sebagai ulama utama di NTB.

Semenjak NW didirikan, para Tuan Guru, di bawah TG. KH. Zainudin Abdul Majid (Tuan Guru Pancor) mengonsolidasikan dirinya dalam satu ikatan identitas. Dan, lewat NW sebagai institusi, para Tuan Guru ini makin mengonsolidasikan dirinya dengan memperluas pengaruh melalui penciptaan institusi-institusi pendidikan yang berafiliasi ke NW.

Namun tulisan ini juga mengamini bahwa menjauhnya ulama dari institusi yang menciptakan legitimasi kekuasaannya: pesantren, adalah faktor dari menurunnya pengaruh ulama di masyarakat, yang pada perkem-

bangun selanjutnya juga melemahkan pengaruh mereka di politik. Tuan Guru, seperti halnya Kyai di Jawa, atau Buya di Sumatera Barat, hingga saat ini masih memiliki peranan sebagai patron yang memiliki kewenangan profetik, dan dilegitimasi oleh kuasa pengetahuan, khususnya agama, hingga masih berpengaruh kuat di masyarakat NTB hingga saat ini disebabkan oleh kemampuan Tuan Guru Bajang, serta para tuan guru pada umumnya untuk tetap menempatkan diri mereka sebagai entitas yang tidak jauh dari pesantren. Meskipun sejak meninggalnya Tuan Guru Pancor, Nadhlatul Wathan dan keturunan dari TGP sempat terjebak dalam konflik berkepanjangan. Namun konflik tersebut justru menjadi faktor penting semakin meluasnya pengaruh tuan guru di masyarakat NTB seiring dengan semakin meningkatnya secara signifikan jumlah institusi pendidikan milik NW sebagai imbas dari konflik internal tersebut. Imbas yang agaknya justru berpengaruh positif terhadap perluasan pengaruh NW dan keluarga inti keturunan dari Tuan Guru Pancor.

Ikatan-ikatan keguruan yang melahirkan imajinasi kebangsaan yang lebih tua dan lebih solid daripada imajinasi kebangsaan paska kemerdekaan yang terinstitusi ini, menjadi modal yang betul-betul signifikan bagi kemenangan si “Tuan Guru Bajang” pada 2008. Kemenangan yang jika dilihat dari sisi partai adalah kemenangan “David melawan Goliath.” Alasannya, ia hanya didukung oleh dua partai yakni PKS dan PBB yang dilihat dari penguasaan kursi legislatif, tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan Lalu Serinata, gubernur *incumbent* kala itu yang didukung oleh Golkar, partai terkuat di NTB berkoalisi dengan partai-partai lain yang juga besar seperti PDI P. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks politik di Nusa Tenggara Barat, partai tidak menjadi faktor krusial. Ketokohan, terutama ketokohan keagamaanlah yang menjadi lebih penting. Pengalaman dua kali pilgub yakni 2008

dan 2013 yang memenangkan TG. H. Zainul Majdi sebagai Gubernur NTB, menjadi penevas hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bartels, M. L. (2008). *The Study of Electoral Behavior*. Department of Politics and Woodrow Wilson School of Public and International Affair. Princeton: Princeton University.
- Fealy, G. (2011). *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952- 1967*. Yogyakarta: Penerbit LKiS.
- Madani, A. A. (2015). *Kyai dan Politik Lokal: Studi Tentang Pudarnya Dominasi Politik Kyai dalam Pemilukada Pamekasan 2013*. Tesis Magister tidak diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muhtar, F. (2010). *Konflik dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Pondok Pesantren Nahdlatul Wathan Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat*. Disertasi tidak diterbitkan. Surabaya: Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel.
- Mujani, S., R. W. Liddle & K. Ambardi (2012). *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan.
- Umam, F. (2009). *Tera Ulang Peran Profetik Tuan Guru dalam Konteks Kebebasan Beragama di Pulau Lombok*. Ulumuna, Volume XIII.